



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/994 /M.SM.04.00/2018
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.**

8 November 2018

Yth. **Walikota Yogyakarta**
di
Yogyakarta

Sesuai dengan surat Walikota Yogyakarta, nomor: 802/2807, tanggal 3 Agustus 2018, hal: Permohonan Penetapan Kelas Jabatan, dengan ini terlampir disampaikan persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Dalam upaya tertib administrasi, kiranya Saudara segera menindaklanjuti dengan:

- a. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sehingga kebutuhan jabatan fungsional per jenjang jabatan dan kebutuhan jabatan pelaksana dapat diketahui kebutuhan riilnya;
- b. Menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana sesuai nomenklatur jabatan pelaksana pada lampiran surat persetujuan ini.

Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan ini diterbitkan sebelum ditetapkan kebutuhan formasi jabatannya.

Selanjutnya, Saudara dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:

- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
- b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
- c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara.